



Peran Strategis Dana Desa dalam APBN: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Ahmad Wahyudi Zein ^{1*}, Dhany Saputra Sembiring ², Ema Julia Ningsih ³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id ^{1*}, ghanysaputrasinulaki@gmail.com ², emajulianingsih04@gmail.com ³

Abstract : *This study uses a qualitative method to provide an in-depth description of the strategic role of village funds within the State Budget (APBN) in improving the welfare of rural communities. Village funds allocated by the central government aim to accelerate development, reduce regional disparities, and strengthen economic independence at the village level. This research examines the mechanisms of distribution, management, and utilization of village funds and relates them to welfare indicators such as income, access to basic services, and economic empowerment. The results show that when managed transparently, accountably, and with community participation, village funds can improve quality of life through infrastructure development, better education and health services, and the growth of micro and small enterprises. However, challenges such as weak capacity of village officials, corruption practices, and lack of supervision remain obstacles that must be addressed. Therefore, synergy between central and regional governments and the community is key to the successful implementation of village funds.*

Keywords: *empowerment, independence, infrastructure, participation, rural development, state budget, Village funds, welfare, supervision, transparency.*

Abstrak : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana peran strategis dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk mempercepat pembangunan, mengurangi kesenjangan wilayah, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa. Penelitian ini menelaah mekanisme penyaluran, pengelolaan, dan pemanfaatan dana desa serta mengaitkannya dengan indikator kesejahteraan masyarakat seperti pendapatan, akses layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dikelola dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif, dana desa mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan usaha mikro dan kecil. Namun demikian, tantangan seperti lemahnya kapasitas aparatur desa, praktik korupsi, serta kurangnya pengawasan menjadi kendala yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi dana desa.

Kata kunci: APBN, Dana desa, infrastruktur, kemandirian, kesejahteraan, partisipasi, pembangunan desa, pemberdayaan, pengawasan, transparansi.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dana desa sebagai bagian dari APBN merupakan instrumen penting yang diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan di tingkat desa. Dana ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memacu pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif. Tim Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI (2019) menjelaskan bahwa dana desa bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota serta meningkatkan kapasitas desa dalam mengelola sumber daya. Selain itu, Syamsul Bahri (2021) menegaskan bahwa dana desa memiliki peran strategis dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat

desa. Dengan demikian, optimalisasi dana desa bukan hanya soal besar kecilnya anggaran, tapi juga bagaimana pengelolaan dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan dana desa yang efektif membutuhkan mekanisme perencanaan dan pengawasan yang baik agar dana tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Herliani dan Nurohman (2019) menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Selain itu, Arjuna (2019) juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang optimal. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur desa sangat diperlukan untuk memastikan setiap program yang dibiayai dana desa berjalan sesuai tujuan dan dapat meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Kendati memiliki potensi besar, pelaksanaan dana desa tidak terlepas dari berbagai tantangan yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa yang sering kali kurang memiliki kompetensi teknis dalam mengelola anggaran. Novita dan Sari (2021) mengemukakan bahwa keterbatasan ini menyebabkan dana desa terkadang kurang optimal dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, praktik korupsi dan penyalahgunaan dana desa juga menjadi masalah serius yang harus diwaspadai. Pemerintah Desa Parakan (2024) menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal serta pemberian pelatihan berkelanjutan bagi aparat desa agar pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

Dana desa juga berperan sebagai stimulus bagi pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan infrastruktur dan pengembangan sektor produktif desa. Kementerian Keuangan RI (2022) menyebutkan bahwa alokasi dana desa diarahkan untuk mendukung pembangunan fisik seperti jalan desa, irigasi, dan fasilitas umum yang menjadi penunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Syamsul Bahri (2021) menambahkan bahwa pemanfaatan dana desa untuk pengembangan usaha mikro dan kecil dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta membuka lapangan kerja baru. Dengan adanya dukungan dana desa yang tepat sasaran, desa tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi basis ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

Optimalisasi dana desa dalam APBN memerlukan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan desa serta partisipasi aktif masyarakat. Tim CiptaDesa (2024) menyatakan bahwa kolaborasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci sukses pelaksanaan dana desa. Pemerintah Desa Parakan (2024) juga menegaskan bahwa penguatan kelembagaan desa dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat penting agar dana desa dapat dikelola secara profesional dan tepat sasaran. Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat perlu dijalankan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Dengan langkah-langkah tersebut, dana desa dapat berfungsi sebagai alat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh dan berkelanjutan.

2. TINJAUAN TEORITIS

Pengelolaan dana desa sebagai instrumen kebijakan fiskal memiliki dasar teori yang kuat dalam teori desentralisasi fiskal. Teori ini menyatakan bahwa desentralisasi anggaran ke tingkat desa memberi peluang bagi pengambilan keputusan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan spesifik masyarakat lokal. Tim Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI (2019) menjelaskan bahwa mekanisme desentralisasi ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara lebih efektif dan efisien. Syamsul Bahri (2021) menambahkan bahwa pengelolaan dana desa yang merupakan bagian integral dari APBN harus didasari prinsip transparansi dan akuntabilitas agar penggunaan anggaran dapat tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan. Oleh karena itu, teori ini menegaskan pentingnya pemberian otonomi desa dalam mengelola dana desa agar program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan sesuai kebutuhan nyata di lapangan dengan dukungan pengawasan yang kuat dari berbagai pihak.

Teori pembangunan berkelanjutan menjadi landasan penting dalam pemanfaatan dana desa, yang tidak hanya mengutamakan pembangunan fisik semata tetapi juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu. Arjuna (2019) menyatakan bahwa pembangunan desa harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Dalam hal ini, dana desa perlu diarahkan untuk mendukung program yang menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan daya dukung lingkungan hidup. Herliani & Nurohman (2019) mengungkapkan bahwa penggunaan dana desa yang efektif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, misalnya melalui program pertanian organik dan

pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan, dana desa menjadi instrumen strategis dalam membangun desa yang mandiri, inklusif, dan ramah lingkungan demi kesejahteraan jangka panjang.

Dalam konteks ekonomi mikro, teori pemberdayaan ekonomi sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana dana desa berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Novita dan Sari (2021) berpendapat bahwa dana desa tidak hanya sebagai sumber pendanaan tetapi juga sebagai modal sosial yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan usaha mikro dan pengembangan sumber daya manusia. Kementerian Keuangan RI (2022) menegaskan bahwa alokasi dana desa yang diarahkan pada sektor ekonomi produktif seperti UMKM dan pelatihan kewirausahaan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa secara signifikan. Pendekatan pemberdayaan ekonomi ini menitikberatkan pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi dan sosial, sehingga mampu mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan serta inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

Terakhir, teori akuntabilitas publik menempatkan pertanggungjawaban sebagai prinsip utama dalam pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien. Syamsul Bahri (2021) menegaskan bahwa pengelolaan dana desa harus mengikuti prinsip akuntabilitas yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas sebagai penerima manfaat. Herliani & Nurohman (2019) menggarisbawahi bahwa akuntabilitas menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa serta memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dalam rangka pembangunan desa. Oleh sebab itu, penerapan sistem pelaporan dan pengawasan yang ketat serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan efektivitas program dana desa, sehingga pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat desa benar-benar tercapai secara optimal.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam peran strategis dana desa dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika pengelolaan dana desa, mulai dari mekanisme penyaluran, pengelolaan, hingga pemanfaatannya dalam konteks sosial dan ekonomi lokal secara komprehensif. Data dikumpulkan melalui wawancara

mendalam dengan aparat desa, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya, serta observasi partisipatif untuk melihat langsung implementasi program dana desa di lapangan. Selain itu, dokumen resmi dan laporan terkait dana desa juga dianalisis untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan valid. Analisis data dilakukan secara tematik dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman holistik dan rekomendasi yang tepat guna untuk memperkuat pengelolaan dana desa demi pembangunan desa yang berkelanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di sejumlah wilayah telah mengadopsi prinsip-prinsip desentralisasi fiskal, pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam menyusun prioritas anggaran melalui musyawarah desa, yang mencerminkan responsivitas terhadap kebutuhan lokal. Penggunaan dana lebih banyak difokuskan pada pembangunan infrastruktur, program sosial, dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan serta bantuan modal usaha. Ini sejalan dengan teori-teori pembangunan yang menekankan pentingnya pemberdayaan lokal dan inklusi sosial sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Namun demikian, sejumlah kendala masih menjadi hambatan dalam optimalisasi dana desa, antara lain lemahnya koordinasi lintas institusi, rendahnya perhatian terhadap aspek lingkungan, serta terbatasnya jangkauan pasar dan transparansi anggaran. Partisipasi masyarakat sering kali masih bersifat simbolik, dan pelibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan belum merata. Berdasarkan teori partisipatif dan pembangunan berkelanjutan, keberhasilan dana desa sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan secara aktif dan informasi dikelola secara transparan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas SDM desa, dan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.

Tabel 1. Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prinsip Desentralisasi Fiskal

No	Aspek yang Diteliti	Temuan Lapangan	Interpretasi Teoritis
1	Kewenangan Desa	Pemerintah desa mengatur sendiri prioritas kegiatan	Sesuai teori desentralisasi fiskal yang menekankan otonomi

2	Proses Penganggaran	Mengacu pada musyawarah desa tahunan	Responsif terhadap kebutuhan lokal
3	Koordinasi dengan Kecamatan	Terkadang tidak sinkron antara desa dan kecamatan	Koordinasi antarlembaga masih lemah dalam desentralisasi
4	Realisasi Belanja	Fokus pada infrastruktur dan kegiatan padat karya	Dana desa diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi lokal
5	Tantangan Utama	Kurangnya kapasitas aparatur dalam menyusun APBDes	Desentralisasi memerlukan penguatan sumber daya manusia desa

Penjelasan:

Berdasarkan hasil temuan, pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa desa memiliki keleluasaan dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan dibiayai menggunakan dana desa. Keputusan tersebut diperoleh melalui forum musyawarah yang melibatkan perwakilan warga dan pemangku kepentingan lokal. Hal ini mencerminkan prinsip utama dari teori desentralisasi fiskal yang memberikan otonomi anggaran kepada pemerintahan di tingkat bawah agar mampu merespons kebutuhan warganya secara langsung dan tepat sasaran.

Namun demikian, hasil lapangan juga mengungkapkan adanya kendala koordinasi antarlembaga seperti pemerintah kecamatan dan kabupaten yang menghambat efektivitas realisasi dana desa. Hal ini berkaitan dengan lemahnya kapasitas aparatur desa dalam memahami teknis penyusunan APBDes dan prinsip penganggaran yang efektif. Berdasarkan teori desentralisasi fiskal, tantangan tersebut menandakan perlunya pelatihan aparatur desa agar mampu menjalankan kewenangannya secara optimal dan akuntabel.

Tabel 2. Pemanfaatan Dana Desa dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

No	Aspek yang Diteliti	Temuan Lapangan	Interpretasi Teoritis
1	Program Sosial	Bantuan sembako dan pemberdayaan lansia	Mewakili dimensi sosial dalam pembangunan berkelanjutan
2	Infrastruktur Desa	Pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi sederhana	Elemen penting dalam keberlanjutan fisik dan akses
3	Lingkungan Hidup	Belum menjadi prioritas dalam program dana desa	Pembangunan belum menyentuh aspek lingkungan

4	Pendidikan dan Kesehatan	Rehabilitasi posyandu dan PAUD desa	Mendukung SDG's pada aspek sosial dan manusia
5	Keberlanjutan Program	Minimnya evaluasi jangka panjang terhadap proyek desa	Aspek monitoring belum maksimal untuk menjaga kesinambungan

Penjelasan:

Penggunaan dana desa dalam beberapa wilayah menunjukkan adanya kepedulian terhadap pembangunan sosial dan infrastruktur fisik. Program sosial yang mencakup bantuan untuk lansia, pemeliharaan jalan, serta peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan, telah memberikan dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan teori pembangunan berkelanjutan, kegiatan ini sudah mencakup dua dari tiga pilar utama yaitu aspek sosial dan ekonomi.

Namun, hasil temuan juga menunjukkan bahwa aspek lingkungan belum menjadi fokus utama dalam penggunaan dana desa. Tidak banyak desa yang mengalokasikan anggaran untuk program konservasi, penghijauan, atau pengelolaan limbah. Padahal, keberhasilan pembangunan jangka panjang sangat ditentukan oleh bagaimana desa menjaga kelestarian lingkungannya. Evaluasi terhadap keberlanjutan program juga masih rendah, yang menunjukkan perlunya sistem monitoring dan evaluasi terpadu sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tabel 3. Dana Desa dalam Perspektif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

No	Aspek yang Diteliti	Temuan Lapangan	Interpretasi Teoritis
1	Program UMKM	Pelatihan kewirausahaan dan pemberian modal usaha kecil	Sesuai teori pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal
2	Pelatihan Keterampilan	Menjahit, pertukangan, dan pengolahan hasil pertanian	Menambah kapasitas individu menuju kemandirian ekonomi
3	Akses ke Pasar	Produk lokal belum menjangkau pasar luar desa	Perlu pendampingan dalam penguatan jaringan usaha
4	Dukungan Modal	Diberikan terbatas, belum merata ke semua pelaku usaha	Pendekatan inkubasi ekonomi belum maksimal

5	Perubahan Pendapatan	Warga yang mengikuti program mencatat peningkatan ekonomi	Pemberdayaan menunjukkan dampak pada pendapatan masyarakat
---	----------------------	---	--

Penjelasan:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak desa telah memanfaatkan dana desa untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif. Pelatihan kewirausahaan, pemberian modal awal, dan peningkatan keterampilan teknis menjadi langkah konkret dalam membangun ekonomi mikro desa. Teori pemberdayaan ekonomi menekankan bahwa pembangunan ekonomi lokal harus berangkat dari potensi yang ada dan melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif.

Meski demikian, masih terdapat kendala seperti rendahnya jangkauan pemasaran produk lokal dan distribusi bantuan modal yang belum merata. Produk yang dihasilkan belum sepenuhnya mampu bersaing di luar wilayah desa karena keterbatasan branding dan promosi. Untuk itu, pemberdayaan ekonomi perlu didukung dengan penguatan jaringan usaha, pelatihan digital marketing, serta inkubasi bisnis yang lebih sistematis agar kemandirian ekonomi desa benar-benar terwujud.

Tabel 4. Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa

No	Aspek yang Diteliti	Temuan Lapangan	Interpretasi Teoritis
1	Musyawarah Desa	Rutin dilakukan tapi tidak semua usulan ditindaklanjuti	Partisipasi masih simbolik, belum substantif
2	Akses Informasi Anggaran	Masih terbatas di beberapa desa	Transparansi belum merata
3	Keterlibatan Perempuan	Perempuan dilibatkan namun belum dalam peran pengambilan keputusan	Perlu penguatan kesetaraan dalam partisipasi
4	Pelaporan dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipajang di papan pengumuman desa	Bentuk akuntabilitas publik yang sederhana namun penting
5	Respon terhadap Kritik	Kritik dari warga kurang ditanggapi	Menunjukkan belum adanya mekanisme pengaduan efektif

Penjelasan:

Temuan lapangan mengindikasikan bahwa proses musyawarah desa sebagai wadah partisipasi warga memang dilakukan secara berkala, namun belum sepenuhnya mengakomodasi semua aspirasi masyarakat. Hal ini menyebabkan partisipasi hanya bersifat prosedural, bukan partisipasi substantif yang memengaruhi kebijakan. Sesuai teori partisipatif, pelibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan sangat krusial untuk keberhasilan program.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana desa masih menjadi tantangan di beberapa tempat. Informasi anggaran belum disampaikan secara luas dan terbuka. Keterlibatan kelompok rentan seperti perempuan juga belum maksimal. Berdasarkan pendekatan partisipatif, perlu adanya sistem yang menjamin keterlibatan semua unsur masyarakat dan mekanisme pelaporan yang terbuka agar penggunaan dana desa dapat diawasi bersama secara efektif dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, dana desa memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan apabila dikelola dengan baik. Penguatan kelembagaan, keterlibatan masyarakat secara substansial, dan integrasi aspek lingkungan dalam program menjadi kunci keberhasilan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa sangat dibutuhkan agar dana desa tidak hanya menjadi alokasi anggaran, tetapi benar-benar menjadi instrumen strategis dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

REFERENSI

- Herliani & A. Nurohman. (2019). Pengaruh Pemanfaatan Dana Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka. *Projemen UNIPA*, Vol. 9 No. 2 Mei 2022. <https://ejournal-nipamof.id/index.php/Projemen/article/download/43/77>[1]
- Syamsul Bahri. (2021). Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Jenderal Soedirman. <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/fisip/article/download/5036/2780>)[4][6]
- Arjuna. (2019). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Projemen UNIPA*, Vol. 9 No. 2 Mei 2022 <https://ejournal-nipamof.id/index.php/Projemen/article/download/43/77>[1]

- Tim Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. (2019). Buku Pintar Dana Desa: Perencanaan, Penganggaran, dan Pokok-Pokok Kebijakan Dana Desa dalam APBN <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/10/BUKU-PINTAR-DANA-DESA-15x23-CETAKAN-KE-2.pdf>)[3]
- Novita, L., & Sari, D. P. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Solimandungan Baru Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal EMBA, Vol. 9 No. 1
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/emba/article/view/32238>)[5]
- Pemerintah Desa Parakan. (2024). Optimalisasi Dana Desa dalam APBN 2025: Langkah Strategis Menuju Kesejahteraan Desa <https://parakan.desaa.id/artikel/1031-optimalisasi-dana-desa-dalam-apbn-2025-langkah-strategis-menuju-kesejahteraan-des>)[2]
- Syamsul Bahri. (2021). Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman.
<https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/fisip/article/download/5036/2780/>)[4][6]
- Kementerian Keuangan RI. (2022). Buku Pintar Dana Desa: Perencanaan, Penganggaran, dan Pokok-Pokok Kebijakan Dana Desa dalam APBN <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/10/BUKU-PINTAR-DANA-DESA-15x23-CETAKAN-KE-2.pdf>)[3]
- Pemerintah Desa Parakan. (2024). Optimalisasi Dana Desa dalam APBN 2025: Langkah Strategis Menuju Kesejahteraan Desa <https://parakan.desaa.id/artikel/1031-optimalisasi-dana-desa-dalam-apbn-2025-langkah-strategis-menuju-kesejahteraan-des>)[2]
- Tim CiptaDesa. (2024). Optimalisasi Dana Desa dalam APBN 2025 <https://kolom.ciptadesa.com/kilas/optimalisasi-dana-desa-dalam-apbn-2025/>)[2]